

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Sindo

# Arah Baru Proyek LRT

### LRT Jakarta Fase 1

- Dibangun : 2015 dan selesai 2019.
- Panjang lintasan : 5,8 km.
- Biaya Pembangunan : Rp6,8 triliun dari APBD Pemprov DKI Jakarta.
- Kontraktor dan operator : PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
- Kereta LRT diproduksi : Hyundai Rotem dan Korea Selatan.

#### Stasiun

Pegangan Duo Depo Kelapa Gading

**Target Penumpang**  
Jumlah penumpang rata-rata 14.000-15.000 orang per hari.

**Tarif**  
Tarif Rp5.000 sekali jalan (flat) setelah disubsidi.

### LRT Jakarta Fase 2

- Panjang lintasan : 8,2 km.
- Kebutuhan dana : Rp7 triliun
- Kebutuhan lahan sebesar di Kelapa Gading dan Tanjung Priuk.
- Anggaran PIVD awal : Rp442 miliar.

#### Stasiun

### DASAR PROYEK LRT

Perpres Nomor 98/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

Diteken Presiden Joko Widodo pada 2 Septemba 2015.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Sindo

# Arah Baru Proyek LRT

**JAKARTA** - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akhirnya melanjutkan proyek pembangunan light rail transit (LRT) Jakarta fase 2A rute Velodrome-Manggarai. Kepastian ini diperoleh setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan veto atas kisruh transportasi berbasis rel tersebut.

Rute Velodrome-Manggarai juga mengubah rencana semula yang disiapkan PT Jakpro, yakni Velodrome-Jakarta International Stadium (JIS). Dengan demikian, LRT Fase 2A ini akan terintegrasi langsung dengan stasiun sentral yang menghubungkan jalur strategis di Pulau Jawa dan Jabodetabek.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta pun sudah menyetujui penyertaan modal daerah (PMD) untuk pembangunan LRT Fase 2A Velodrome menuju Manggarai pada 2023. Besaran PMD LRT fase 2A senilai Rp442 miliar diserahkan ke BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pengembang yang berwenang. Persetujuan ini ditetapkan dalam rapat Banggar DPRD DKI yang membahas rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD 2023 di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/11) lalu.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan, pembangunan proyek LRT Jakarta fase 2A dengan rute sebelumnya Velodrome-JIS memang belum disetujui Kementerian Perhubungan (Kemhub). Saat itu, melalui surat pada Agustus 2018, Kemhub mengatakan trase LRT Jakarta yang diusulkan perlu dilakukan penyesuaian dengan trase LRT Jabodetabek.

Selain itu, perlu dilakukan sinkronisasi dan integrasi terhadap jalur kereta api layang lintas Jatinegara-Manggarai, termasuk Stasiun Manggarai, serta rencana pembangunan jalur *elevated loopline* lintas timur (Kampung Bandan-Rajawali-Manggarai) dan lintas barat (Manggarai-Tanah Abang-Kampung Bandan).

Menurut Heru, ada alasan utama mengapa Presiden Jokowi ingin melanjutkan proyek LRT Jakarta fase 2A dengan perubahan rute menjadi Velodrome-Manggarai: komitmen menyediakan infrastruktur transportasi umum di DKI Jakarta. "Sebagaimana diketahui bahwa saat ini Stasiun Manggarai menjadi sentral stasiun KA antarkota. Karena itu, kami melihat kelanjutan LRT Jakarta rute Velodrome-Manggarai agar terjadi konektivitas yang utuh antara KA antarkota dan KRL dengan LRT Jakarta," ucap Heru saat dihubungi KORANSINDO kemarin.

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) itu membeberkan, pembangunan LRT Jakarta sudah direncanakan sejak 2021, tapi terkendala kapasitas fiskal Jakarta sebagai dampak pandemi Covid-19. Saat ini sedang direncanakan untuk pembangunan lanjutan LRT dimaksud. Lantas mengapa rute fase 2A mengalami perubahan dari sebelumnya Velodrome-JIS menjadi Velodrome-Manggarai? "Jakarta berkomitmen melanjutkan pembangunan LRT dan mendukung konektivitas yang utuh terhadap layanan perkeretaapian. Mengingat rencana Kemhub menjadikan Stasiun Manggarai sebagai sentral stasiun kereta api jarak jauh, kami memandang perlu untuk mengintegrasikan LRT Jakarta dengan sentral stasiun Manggarai," ujarnya.

Heru belum mau berspekulasi berapa total anggaran yang dibutuhkan untuk fase 2A dan berapa tahun keseluruhan pengerjaannya. Menurut Heru, saat ini Pemprov DKI sedang melakukan perhitungan kembali total kebutuhan anggaran ;

nya. Menurut dia, ada menggaransi proyek fase 2A ini sudah melalui *feasibility study* (FS). "Rute Velodrome-Manggarai sudah dikaji dalam *feasibility study* dan saat ini sedang dalam tahapan *review FS*," tutup mantan wali kota Jakarta Utara itu.

Terkait rencana rute LRT ke stasiun Manggarai, menteri perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan telah menyetujuinya. Saat memberikan keterangan pekan lalu di Istana Negara, Budi menyatakan bahwa rencana tersebut sejalan dengan target menjadikan manggarai sebagai stasiun sentral.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menegaskan, pembangunan LRT Jakarta fase 2A dilanjutkan. Saat ini rencana pembangunan tersebut masih dalam tahap pengkajian lebih dalam. "Proyek LRT masih dalam proses pengkajian. Pembangunan transportasi massal berbasis rel seperti LRT membutuhkan analisis mendalam karena menyangkut sejumlah faktor seperti tata guna lahan, proyeksi potensi penumpang di masa mendatang, serta model pendanaan," kata Syafrin belum lama ini.

Syafrin menekankan, saat ini pembangunan LRT tidak terkendala regulasi. Hanya, rencana rute lanjutan LRT yang harusnya dimulai 2022 terkendala kapasitas fiskal dampak pandemi Covid-19. "Tidak ada kendala regulasi terkait pembangunan LRT, sebagaimana diketahui bahwa sesuai rencana lanjutan rute LRT akan dimulai 2020, namun terkendala kapasitas fiskal Jakarta sebagai dampak Pandemi Covid-19," paparnya.

Penyisipan regulasi sejak 2015 yang dimaksud yakni *electronic road pricing* (ERP). ERP merupakan salah satu kebijakan dalam mekanisme *push and pull strategy* dalam transportasi. "Selain penyediaan fasilitas sarana dan prasarana angkutan umum massal sebagai

*supply* (penyediaan) layanan di sektor transportasi (*pull strategy*), pemerintah juga menetapkan kebijakan yang dapat mengendalikan mobilitas warga dengan kendaraan pribadi melalui *push strategy* seperti pengendalian tarif parkir, ganjil genap, dan ERP," urainya.

Kendati demikian, implementasi ERP hingga saat ini masih terkendala peraturan. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD Provinsi DKI Jakarta sedang dalam proses penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PLLSE) dan sudah memasuki tahap final. "Perda PLLSE ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum implementasi ERP di Jakarta. ERP diharapkan akan menjadi sebuah solusi untuk mengatasi kemacetan di DKI Jakarta," katanya.

## Dukungan Penuh DPRD

Ketua Banggar yang juga Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memberikan dukungan penuh kepada Pemprov DKI Jakarta melanjutkan proyek pembangunan tersebut. Dukungan ini terbukti dengan adanya keputusan Banggar DPRD DKI Jakarta mengesahkan usulan PMD untuk pembangunan LRT Jakarta Fase 2A sebesar Rp442 miliar. Anggaran tersebut akan diserahkan ke BUMD DKI Jakarta yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pengembang yang berwenang melakukan pembangunan. "VelodromesanggaraiManggarai dibuat Mo'lya," kata Edi.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail juga menegaskan, proyek LRT Jakarta adalah program krusial yang harus segera dijalankan. Pasalnya, LRT merupakan upaya mengatasi kemacetan di Jakarta. Persetujuan PMD sebesar Rp442 miliar untuk proyek LRT fase 2A menjadi bagian dari komitmen DPRD untuk menindaklanjuti pembangunan LRT fase 2A yang sudah dirintis sejak sebelumnya.

Pembangunan lanjutan dengan rute Velodrome-Manggarai, kata Ismail, sesuai keputusan hasil rapat Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono dengan pemerintah pusat. "Persetujuan PMD jadi bagian dari

komitmen kita untuk menindaklanjuti pembangunan LRT fase 2A yang sudah dirintis sejak kemarin (sebelumnya). DPRD akan terus mendukung," ujarnya.

Ismail kemudian membeberkan, dengan pengesahan PMD dan dukungan DPRD DKI diharapkan pembangunan LRT Jakarta dapat dikerjakan lagi tahun depan. Bagi Ismail, potensi LRT Jakarta sebagai angkutan umum massal yang terintegrasi sangat berpengaruh untuk masyarakat Jakarta.

faurick.pakpahan/sabir.laluhu/ananda.nararya/sindonews